

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Tonny Hartono, Wawancara Narasumber, Kantor UPTD TPAS Manggar, 8 Agustus 2014.

Warga sekitar UPTD TPAS Manggar, Hasil Wawancara Responden, RT 36 dan 61 Kelurahan Manggar, 10 Agustus 2014.

Buku

Adi, I.R., 2012, *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gunawan, Jamil, 2005, *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Hakim, A.A., 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, 2011, *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta.

Koentjoroningrat, 1993, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.

Marbun, S.F. dan Mahfud M.D., 2009, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____ 2007, *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nursid Sumaatmadja, 1986, *Pengantar Studi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Local*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* cet. 2012, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- _____ 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumaatmadja, Nursid, 1986, *Pengantar Studi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Sumardjono, M.F.I., 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____ 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____ 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, 2012, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta.

Thoha, Miftah, 2011, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Kencana, Jakarta.

Tocqueville, A.D., 2005, *Alexis De Tocqueville on Democracy, Revolution, and Society*, Kedutaan Amerika Serikat Jakarta bekerjasama dengan Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ubaidillah, Ahmad dan Abdul Rozak, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi Hak Asasi manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Utami, Eka, 2013, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*, Yayasan Unilever Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Fauzi, Noer, “Ketegangan antara Otonomi Komunitas vs Otonomi Pemerintahan”, ed: Dadang Juliantara, 2000, *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 135-150.

Finalia dan Magdalena Zebua, “Mengembalikan Pemanfaatan SDA kepada Masyarakat (Studi kasus di Bangka)”, *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Maranatha University Press, Bandung, vol. 3 no. 1 November 2011, hlm. 130-144.

- Lakshmanan, P. "Participatory Planning in Kerala", M. Retna Raj, April 2006, *Decentralised Governance and Poverty Reduction: Lesson from Kerala*, The Director Kerala Institute of Local Administration (KILA), Kerala, India, hlm. 121
- Mahardika, Timur, "Otonomi Daerah untuk Pemberdayaan Rakyat", ed: Dadang Juliantara, 2000, *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 173-190.
- Nugroho, Wahyu, "Konsistensi Pemerintah Daerah atas Penerapan Desentralisasi Bidang Lingkungan Hidup dalam Perundang-undangan Lingkungan Hidup Berbasis Hukum Progresif (*Local Government Consistency on Decentralitation Implementatio of Enviromenttal Legislation Based on Progressive Law*)", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 11 No 2, Juni 2014, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Hlm. 113
- Ramakantan, N., "Lesson for Empowerment and Democratization: Non-governmental Support System for Local Governance", M. Retna Raj, April 2006, *Decentralised Governance and Poverty Reduction: Lesson from Kerala*, The Director Kerala Institute of Local Administration (KILA), Kerala, India, hlm. 180.
- Semenguk, Adius dan Abdulmuthalib Tahar, "Peranan Dinas Otonom Daerah Tk II Kodya Bandar Lampung Memberikan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal penelitian Ilmu Hukum Justisia* No. 14 tahun V Januari, FH Universitas Negeri Lampung, hlm. 1-8.

Sujarwanto, “Aplikasi Metodologi Penelitian Survey dalam Pelaksanaan KKN”,
ed: Jabrohim, *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama*,
Pustaka Pelajar dan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, hlm. 117-
126.

Venniyoor, Ajith, “Gram Swaraj and Panchayati Raj: Gandhian Perspective”, M.
Retna Raj, April 2006, *Decentralised Governance and Poverty Reduction:
Lesson from Kerala*, The Director Kerala Institute of Local Administration
(KILA), Kerala, India, hlm. 53

Vijayanand, S.M., “Social Accountability and Participatory Planning”, M. Retna
Raj, April 2006, *Decentralised Governance and Poverty Reduction:
Lesson from Kerala*, The Director Kerala Institute of Local Administration
(KILA), Kerala, India, hlm. 80.

Wangke, Humphrey, “Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
2015”, *Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional*, Hubungan
Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)
Setjen DPR RI, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014, hlm. 5-8.

Makalah

Kartosuwiryo, R.W., “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kota
Balikpapan dalam Mengembangkan Potensi Lokal melalui UMKM”,
*Proposal Kemitraan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan
Masyarakat, Tim KKN PPM UGM Antar Semester 2014 Unit KTM-01*,
Balikpapan, hlm. 2.

Otje Salaman, Dewi Kania, Dadang Epi, “Metode Penelitian Hukum”, *Campus in Compact*, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005, Bandung.

Dokumen Resmi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SSP).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025.

Anonim, September 2013, Draft Laporan Kajian antara Pra Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan, kerjasama Pemerintah Kota Balikpapan dengan CDIA (*Cities Development Initiative for Asia*), Manila.

Naskah Akademis Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan akhir masterplan pengelolaan persampahan dan kebersihan kota Balikpapan Tahun 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5430).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
Penjelasan Lampiran IA tentang Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi kode
01.07.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rertibusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Per-05/MBU/2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012
tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Balikpapan
Nomor :18 Tahun 2002 Seri :D Nomor 03 Tanggal :11 Pebruari 2002);

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tantang Pengelolaan
Sampah. (Lembaran Daerah Kota Balikpapan 2004 Nomor 20 SERI E
Nomor 12).

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah. (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 Seri D Nomor 03 Tanggal 23 Januari 2001).

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13).

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan 2013 Nomor 1).

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 12).

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 18).

Skripsi dan Tesis

Bokau, I.N., *Peranan Komunikasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Boyong Atas (Suatu Studi Peranan Kepala Desa)*, Skripsi Universitas Sam Ratulangi.

Huda, Syaiful, 2014, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus: di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tangkil, Kabupaaten Pati)*, Skripsi Jinayah Siyasa, Fakultas Hukum dan Syari`ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Jintang, Ardiansyah, 2014, *Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Tahun 2009)*, Skripsi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Suriata, I.N., 2011, *Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Prinsip-prinsip Demokrasi*, Tesis Program Magister Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.

E-book

Jeremy Bentham, “Happiness Is the Greatest Good”,
<http://philosophy.lander.edu/intro/articles/bentham-a.pdf> , diakses pada 11
April 2015.

E-Journal

Setiamarga, B.H., “Indonesia Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler”,
Center for Policy Analysis (CePA) Institut Leimena. Civis Vol. 2 No. 2
Agustus 2010. <http://www.leimena.org/id/page/v/201/pentingnya-revisi-uu-no.-102004> diakses pada 30 Mei 2015.

Wardhani, A.C., “Komunikasi Pemerintahan Daerah Berbasis Kearifan Lokal”,
Menggagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal, Jurusan Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Lampung dan Program Magister Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Lampung, hlm. 77-87.
[http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/06.ANDY%20CORRY-
unila.pdf](http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/06.ANDY%20CORRY-unila.pdf) Diakses pada 30 Mei 2015.

Website

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Balikpapan,
<http://bpmppkb.balikpapan.go.id/content/21/tugas-dan-fungsi> diakses pada
13 Mei 2015.

Hukum Online, “Menyimak Perbedaan Kata dengan dan dalam”,
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15982/menyimak-perbedaan-
kata-dengan-dan-dalam](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15982/menyimak-perbedaan-kata-dengan-dan-dalam) diakses pada 13 Mei 2015.

Institute of Gobar Enviromental Strategis, “*Follow-up Seminar of KitaQ System
Composting in Asia*”,
<http://www.iges.or.jp/en/archive/kuc/pdf/activity20120717/PPT4.pdf>
diakses pada 8 Juni 2015.

Lembaga Swadaya Masyarakat Stabil, “Tentang Kami”,
<http://perkumpulanstabil.org/about/> diakses pada 13 Mei 2015.

Yayasan Unilever, “Program Lingkungan”,

<http://www.unilever.co.id/id/aboutus/yayasanunileverindonesia/programlingkungan/> diakses pada 13 Mei 2015.

LPPM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta copyright 2013, “Prinsip Pelaksanaan KKN-PPM”, www.ugm.ac.id diakses 5 Juli 2015.

E-News

Tim Redaksi, Selasa, 28 Mei 2013, “Sistem Pengelolaan TPA Terbaik di Indonesia Bagian Timur”, *Kaltim Post*,

<http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/21232/sistem-pengelolaan-tpa-terbaik-di-indonesia-bagian-timur.html> diakses pada 13 Mei 2015.